



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan

- Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 26. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/830/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4);
 33. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
 34. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang dibantu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat.
4. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Barat yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Barat yang mengurangi ekuitas dan lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
8. Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 723.256.300.129,-
2. Belanja Daerah	Rp. 756.309.200.216,-
3. Pembiayaan	Rp. 33.052.900.087,-

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.062.100.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 702.459.200.129,-
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>Rp. 5.735.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 723.256.300.129,-

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasional	
1. Belanja Pegawai	Rp. 246.344.682.089,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 169.813.869.382,-
3. Belanja Hibah	Rp. 7.674.125.404,-
4. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 11.364.702.000,-</u>
Jumlah Belanja Operasional	Rp. 435.197.378.875,-
b. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Tanah	Rp. 600.000.000,-
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 55.467.788.650,-
3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 68.148.042.614,-
4. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp. 47.684.594.657,-
5. Belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp. 349.154.320,-</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 172.249.580.241,-
c. Belanja tidak terduga	Rp. 5.250.000.000,-
d. Belanja transfer	Rp. 143.612.241.100,-

Total Belanja Daerah	Rp. 756.309.200.216,-
Surplus/(Defisit)	(Rp. 33.052.900.087,-)

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan	Rp. 34.052.900.087,-
b. Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,-
c. Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 33.052.900.087,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan	Rp. 0,-

Pasal 6

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

PENATA

NIP. 19900513 201403 1 001

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.062.100.000
4.1.01	Pajak Daerah	5.831.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	6.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	6.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.750.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.750.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	95.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	95.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	95.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	620.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	620.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	620.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	350.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	350.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	350.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	499.100.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	100.444.243
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.444.243
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.444.243
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	50.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	318.655.757
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	270.655.757
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	65.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	10.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.655.757
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	95.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	2.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	2.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	45.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	80.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.072.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.072.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.072.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.072.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.660.000.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.650.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.300.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.300.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	350.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	350.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	600.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	100.000.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	500.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.710.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.710.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.710.000.000
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	500.000.000
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	500.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	500.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	150.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	702.459.200.129
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	690.132.087.744
4.2.01.01	Dana Perimbangan	580.261.576.744
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.004.121.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.308.838.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.541.857.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.807.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	256.148.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.698.370.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	247.275.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	330.192.600.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	330.192.600.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	150.891.032.744
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	521.797.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.733.153.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.587.679.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.893.086.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	618.554.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	828.291.544
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	426.402.800
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.894.119.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.481.404.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.506.870.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	83.008.908.400
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	733.162.000
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	4.657.606.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.173.823.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.214.750.000
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	760.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	15.335.089.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.196.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	28.283.803.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.292.820.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	84.920.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.277.388.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	10.803.746.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	250.911.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.654.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.618.142.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	266.800.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	1.261.042.000
4.2.01.02.01	DID	1.261.042.000
4.2.01.02.01.0001	DID	1.261.042.000
4.2.01.05	Dana Desa	108.609.469.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	108.609.469.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	108.609.469.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.327.112.385
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	12.327.112.385
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12.327.112.385
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.327.112.385
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.735.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.735.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	5.735.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.735.000.000
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	5.735.000.000
	Jumlah Pendapatan	723.256.300.129
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	435.197.378.875
5.1.01	Belanja Pegawai	246.344.682.089
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	160.021.639.989
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	117.094.476.259

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	95.076.420.598
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	22.018.055.661
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.271.335.414
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.678.928.269
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.592.407.145
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.354.175.359
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.892.715.027
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1.461.460.332
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.085.614.130
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.455.922.880
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.629.691.250
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.096.408.719
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.614.234.714
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	482.174.005
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.002.157.980
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.161.661.645
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.840.496.335
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	161.428.114
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	124.299.648
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.128.466
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.044.014
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.653.891
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.390.123
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.500.000.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.000.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.500.000.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	450.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	346.500.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	103.500.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.000.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	770.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	230.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.892.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.192.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.192.000.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.000.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.000.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.000.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.000.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	700.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	700.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.000.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.000.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.281.042.100
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	175.547.885
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	600.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	50.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	15.000.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	52.447.885
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	20.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	32.500.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	24.452.115
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.500.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12.552.115
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	100.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.250.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	5.500.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.335.089.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	15.335.089.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	28.283.803.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	28.283.803.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.196.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.196.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.253.550.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.531.216.600

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.622.333.500
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	100.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.539.120.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	42.000.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	42.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	42.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	39.600.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	39.600.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	186.480.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	186.480.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	288.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	288.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.436.400.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.436.400.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.830.472
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.830.472
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.385.800.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	30.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.800.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.352.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.592.680.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.592.680.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.669.028
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.669.028
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.354.343
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	60.060.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.932.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.932.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.625.586
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.625.586
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.691.608
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.691.608
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.042.684
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.042.684
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.465
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.465
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	430.525.657
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	319.645.657
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	319.645.657
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.813.869.382
5.1.02.01	Belanja Barang	32.356.984.101
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32.356.984.101
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	198.853.097
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	515.812.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.635.343.850
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	24.911.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	148.676.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	127.956.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	261.510.833
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	39.578.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.345.605.613
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	935.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.450.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.541.706.607
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	77.536.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.659.994.143
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	326.561.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	88.560.710
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	392.566.700
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.115.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.905.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	422.625.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.992.931.200
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.929.424.931
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.862.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	425.050.022
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.153.368.000
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.409.909.815
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	268.877.380
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.779.095.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	130.600.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	136.912.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	59.567.200
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	133.200.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31.900.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	188.910.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	60.600.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	91.500.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.800.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.375.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.750.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	168.100.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	175.250.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27.600.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	261.000.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	13.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	62.602.629.070
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	46.875.690.720
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.628.240.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.426.850.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	60.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.696.005.800
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	26.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	268.400.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.650.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.737.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.854.791.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	910.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	268.500.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	422.250.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	6.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.317.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.407.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.232.127.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	950.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	525.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	395.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	978.400.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	35.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.750.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	420.500.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.358.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	14.400.000
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	224.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.449.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.683.482.260
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	453.750.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.620.804.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	84.509.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	200.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	123.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	3.033.338.660
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.445.536.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	250.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.350.431.200
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.299.960.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.683.436.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.035.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	350.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	744.380.000
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	3.780.000
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0
5.1.02.02.04.0005	Belanja Sewa Hauler	1.000.000
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	19.590.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	470.300.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.500.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.310.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.800.000
5.1.02.02.04.0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	0
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	25.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	110.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	47.450.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	1.650.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	419.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	419.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.135.107.150
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	190.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.016.900.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	241.550.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	285.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.217.394.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	720.395.150
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	80.000.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	83.868.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.080.000.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	830.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	665.440.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	665.440.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.115.580.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	38.880.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	960.200.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	116.500.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	217.000.000
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	217.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.357.437.311
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.749.367.400
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	4.580.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.324.041.400
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	743.290.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	687.200.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	26.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	964.029.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	227.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.608.069.911
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.159.968.760
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	307.600.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	52.500.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.001.151
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	66.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	33.398.953.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.398.953.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.691.052.800
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	572.015.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.063.286.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	66.600.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.795.735.500
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.929.235.500
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	110.500.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	51.800.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.440.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	326.935.500
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.866.500.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	381.500.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.485.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.302.129.600
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.302.129.600
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.302.129.600
5.1.05	Belanja Hibah	7.674.125.404
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.000.160.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.326.340.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	985.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	341.340.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.623.820.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.623.820.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.050.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.050.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	1.292.400.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.292.400.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.292.400.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	381.565.404

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	381.565.404
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	381.565.404
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.364.702.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.386.602.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.386.602.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.386.602.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.969.400.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.873.900.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.873.900.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	95.500.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	95.500.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.700.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.700.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	8.700.000
5.2	BELANJA MODAL	172.249.580.241
5.2.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	600.000.000
5.2.01.01.03.0017	Belanja Modal Tanah Kampung	600.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.467.788.650
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	334.200.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	334.200.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	334.200.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.234.830.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.234.830.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.918.200.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	316.630.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	309.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	309.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	309.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	670.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	670.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	670.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.986.700.570
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.600.990.710
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	43.160.900
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.557.829.810
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.370.183.860
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	551.003.560
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	756.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	18.886.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	188.401.500
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	9.702.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	601.434.800
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.526.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.526.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	27.500.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	27.500.000
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	5.000.000
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	5.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.925.316.200
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.000.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	12.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	23.913.316.200
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	17.600.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	23.895.716.200
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	475.590.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	438.790.000
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	265.400.000
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	173.390.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	36.800.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	36.800.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.112.736.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.105.436.800
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	800.222.800
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	305.214.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.300.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.500.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	800.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.480.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	9.480.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	9.480.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	8.945.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	8.945.000.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	8.945.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	50.820.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.820.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.820.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.359.636.080
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.359.636.080
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.359.636.080
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.148.042.614
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.975.427.270
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.975.427.270
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	250.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	43.200.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.451.156.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	24.021.270
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	300.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	172.615.344
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	172.615.344
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	172.615.344
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.684.594.657
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.949.413.050
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	29.449.413.050
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	29.449.413.050
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	0
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.500.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.500.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.735.181.607
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.925.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.925.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.000.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.000.000.000

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.810.181.607
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	10.810.181.607
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	349.154.320
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	23.818.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	23.818.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	10.948.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	684.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	685.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	705.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	796.000
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	10.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12.352.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	12.352.000
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	12.352.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	0
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	0
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	0
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	312.984.320
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	312.984.320
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	312.984.320
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.250.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.250.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	143.612.241.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	583.100.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	583.100.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	583.100.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	583.100.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.029.141.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	143.029.141.100
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	143.029.141.100
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	143.029.141.100

KABUPATEN NIAS BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Belanja	756.309.200.216
	Total Surplus/(Defisit)	(33.052.900.087)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.052.900.087
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.052.900.087
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.052.900.087
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	34.052.900.087
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	34.052.900.087
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.052.900.087
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	33.052.900.087

Bupati Nias Barat

ttd

KHENOKI WARUWU